



Jurnal BADATI Ilmu Sosial & Humaniora

Vol 7 No 1 April 2025

P-ISSN : 1907 – 5340

E-ISSN : 2722 - 3248

Hal. : 148 - 166

INTERSEKSI POLITIK IDENTITAS DAN AKSES LAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL PADA KELOMPOK MINORITAS DI KOTA AMBON

Jeanee Belthia Nikijuluw¹ Marthin Jonas Maspaitella²

¹Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pattimura
Email : jeanenikijuluw@gmail.com

²Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UKIM

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji hubungan antara politik identitas dan akses layanan kesejahteraan sosial pada kelompok minoritas di Kota Ambon. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode studi kasus, penelitian ini melibatkan wawancara mendalam dengan 32 informan dari berbagai kelompok minoritas serta 15 pemangku kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik identitas masih mempengaruhi distribusi dan akses layanan kesejahteraan sosial, terutama dalam konteks pasca-konflik di Ambon. Terdapat disparitas signifikan dalam akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan bantuan sosial berdasarkan identitas etnis dan agama. Penelitian juga mengidentifikasi adanya mekanisme adaptif yang dikembangkan oleh kelompok minoritas untuk mengatasi hambatan struktural tersebut. Implikasi dari temuan ini menekankan pentingnya reformulasi kebijakan kesejahteraan sosial yang inklusif dan berkeadilan dengan mempertimbangkan kompleksitas identitas dalam konteks lokal Kota Ambon.

Kata kunci: politik identitas, kesejahteraan sosial, kelompok minoritas, Ambon, kebijakan inklusif

PENDAHULUAN

Interseksi antara politik identitas dan akses layanan kesejahteraan sosial merupakan isu krusial dalam konteks masyarakat majemuk, terutama di wilayah pasca-konflik seperti Kota Ambon. Sebagai wilayah yang pernah mengalami konflik komunal besar pada periode 1999-2002, struktur sosial Kota Ambon telah mengalami transformasi signifikan yang berdampak pada pengembangan kebijakan kesejahteraan sosial dan distribusinya kepada berbagai kelompok masyarakat (Pariela, 2018). Ketidakmerataan akses terhadap layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan bantuan sosial seringkali memiliki dimensi identitas yang kompleks, terutama bagi kelompok-kelompok minoritas yang rentan mengalami marginalisasi ganda.

Politik identitas sendiri merujuk pada mobilisasi politik yang didasarkan pada identitas tertentu seperti etnis, agama, atau bahasa sebagai sumber klaim kolektif (Castells, 2010). Di Kota Ambon, politik identitas telah terbentuk melalui proses historis panjang yang dipengaruhi oleh kebijakan kolonial, migrasi, dan konflik sosial (Braithwaite et al., 2010). Segregasi pemukiman yang terbentuk pasca-konflik telah menciptakan pola spasial baru dalam distribusi populasi berdasarkan identitas, yang pada gilirannya juga mempengaruhi pola akses terhadap layanan kesejahteraan sosial (Pariela, 2018).

Meskipun isu kesejahteraan sosial telah menjadi fokus dalam agenda pembangunan di Kota Ambon pasca-konflik, penelitian mendalam tentang bagaimana politik identitas mempengaruhi akses kelompok minoritas terhadap layanan kesejahteraan sosial masih relatif terbatas. Studi-studi sebelumnya cenderung berfokus pada aspek rekonsiliasi (Adam, 2013), pemulihan ekonomi (Pariela, 2018), atau membangun perdamaian (Braithwaite et al., 2010), namun belum secara spesifik menganalisis dinamika akses kesejahteraan sosial dalam konteks politik identitas yang kompleks.

Penelitian yang dilakukan oleh Mawardi (2019) telah menunjukkan bahwa terdapat disparitas yang signifikan dalam distribusi layanan kesejahteraan sosial antara kelompok mayoritas dan minoritas di beberapa wilayah di Indonesia Timur. Namun penelitian tersebut belum secara mendalam mengeksplorasi bagaimana politik identitas beroperasi dalam membentuk kebijakan dan praktik distribusi layanan kesejahteraan sosial di tingkat lokal. Sementara itu, Pariela (2018) dalam studinya tentang rekonstruksi sosial di Ambon pasca-konflik menyinggung tentang adanya ketidakmerataan akses terhadap layanan publik, namun belum secara eksplisit menganalisis kaitannya dengan politik identitas.

Penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis secara mendalam bagaimana politik identitas beroperasi dalam konteks kebijakan dan praktik kesejahteraan sosial di Kota Ambon, serta bagaimana hal tersebut mempengaruhi akses kelompok minoritas terhadap layanan kesejahteraan sosial. Terdapat tiga pertanyaan utama yang menjadi fokus penelitian ini: (1) Bagaimana manifestasi politik identitas dalam kebijakan dan praktik kesejahteraan sosial di Kota Ambon? (2) Bagaimana kelompok minoritas mengalami dan menavigasi hambatan dalam mengakses layanan kesejahteraan sosial? dan (3) Strategi adaptif apa yang dikembangkan oleh kelompok minoritas dalam menghadapi hambatan struktural tersebut?

Memahami dinamika politik identitas dalam konteks kesejahteraan sosial memiliki urgensi teoretis maupun praktis. Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kerangka analitis tentang politik identitas dan kesejahteraan sosial dalam konteks masyarakat pasca-konflik. Secara praktis, temuan penelitian ini dapat menjadi landasan bagi reformulasi kebijakan kesejahteraan sosial yang lebih inklusif dan berkeadilan di Kota Ambon dan daerah-daerah lain dengan karakteristik serupa.

TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian mengenai politik identitas dan kesejahteraan sosial telah berkembang secara signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Bagian ini akan mengkaji literatur yang relevan dengan fokus penelitian, yang mencakup konseptualisasi politik identitas, teori kesejahteraan sosial, serta penelitian-penelitian terdahulu mengenai kelompok minoritas dan akses layanan sosial.

Politik Identitas dalam Konteks Indonesia

Politik identitas merujuk pada fenomena di mana identitas kolektif (seperti etnis, agama, gender, atau kelas sosial) menjadi basis untuk mobilisasi politik dan tuntutan sosial (Castells, 2010). Dalam konteks Indonesia, politik identitas telah menjadi fitur penting dalam lanskap politik kontemporer, terutama sejak era reformasi tahun 1998 (Aspinall, 2011). Hadiz (2016) mencatat bahwa transisi demokratis di Indonesia telah membuka ruang bagi artikulasi identitas yang sebelumnya tertekani selama era Orde Baru. Namun, sebagaimana dikemukakan oleh Aspinall (2011), politik identitas di Indonesia seringkali bersifat ambivalen, di satu sisi mendorong pengakuan atas keberagaman, namun di sisi lain juga berpotensi memperkuat segregasi sosial.

Dalam konteks Maluku dan Kota Ambon secara khusus, politik identitas memiliki akar historis yang kompleks. Studi yang dilakukan oleh Braithwaite et al. (2010) menunjukkan bahwa identitas etno-religius di Maluku telah dibentuk melalui proses sejarah panjang yang melibatkan kebijakan kolonial, migrasi, dan pertarungan ekonomi-politik. Adam (2013) mencatat bahwa konflik komunal di Ambon (1999-2002) pada dasarnya merupakan manifestasi dari ketegangan identitas yang telah lama terpendam, yang kemudian meledak dalam konteks transisi politik nasional.

Pasca-konflik, politik identitas di Ambon mengalami transformasi, namun tetap menjadi faktor penting dalam konfigurasi sosial-politik. Pariela (2018) dalam penelitiannya tentang rekonstruksi sosial di Ambon pasca-konflik menemukan bahwa segregasi spasial berdasarkan identitas agama telah menjadi fitur permanen dalam struktur sosial Kota Ambon. Segregasi ini memiliki implikasi signifikan terhadap distribusi sumber daya dan akses terhadap layanan publik.

Kesejahteraan Sosial dan Inklusivitas

Kesejahteraan sosial mencakup aspek-aspek yang luas, termasuk pemenuhan kebutuhan dasar, akses terhadap layanan publik, serta kondisi sosial-ekonomi masyarakat (Midgley, 2014). Dalam perspektif kebijakan publik, kesejahteraan sosial seringkali diwujudkan melalui berbagai program perlindungan sosial, layanan publik, dan kebijakan redistributif.

Inklusivitas dalam kesejahteraan sosial menjadi isu penting dalam konteks masyarakat majemuk. Nussbaum (2011) berargumen bahwa kebijakan kesejahteraan yang adil harus mempertimbangkan keragaman dalam masyarakat dan berupaya mengatasi hambatan struktural yang dihadapi oleh kelompok-kelompok marjinal. Sejalan dengan itu, Sen (2011) menekankan pentingnya pendekatan kapabilitas yang memungkinkan setiap individu dan kelompok mengembangkan potensinya secara optimal.

Dalam konteks Indonesia, studi yang dilakukan oleh Sumarto (2017) menunjukkan bahwa inklusivitas masih menjadi tantangan utama dalam implementasi kebijakan kesejahteraan sosial. Meskipun terdapat berbagai program perlindungan sosial, namun dalam praktiknya seringkali terdapat bias yang menguntungkan kelompok-kelompok tertentu. Khusus untuk Maluku, Mawardi (2019) menemukan bahwa terdapat disparitas signifikan dalam akses terhadap program kesejahteraan sosial antara kelompok mayoritas dan minoritas.

Kelompok Minoritas dan Akses Layanan Sosial

Literatur mengenai kelompok minoritas dan akses layanan sosial umumnya berfokus pada hambatan struktural dan diskriminasi yang dihadapi oleh kelompok-kelompok marjinal. Young (2011) dalam studinya tentang keadilan dan politik perbedaan mengidentifikasi lima bentuk penindasan yang seringkali dialami oleh kelompok minoritas: eksploitasi, marginalisasi, ketidakberdayaan, imperialisme budaya, dan kekerasan sistemik. Bentuk-bentuk penindasan ini

pada gilirannya mempengaruhi akses kelompok minoritas terhadap layanan sosial dan kesejahteraan.

Di Indonesia, penelitian tentang kelompok minoritas dan akses layanan sosial masih relatif terbatas. Namun, beberapa studi seperti yang dilakukan oleh Tambunan (2018) mengindikasikan bahwa kelompok minoritas etnis dan agama seringkali menghadapi hambatan dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan. Studi oleh Rahayu (2017) di Maluku menemukan bahwa kelompok minoritas di wilayah pasca-konflik menghadapi tantangan ganda, yaitu hambatan struktural dan stigma sosial, yang mempengaruhi akses mereka terhadap layanan publik.

Meskipun studi-studi tersebut memberikan wawasan berharga tentang hambatan yang dihadapi kelompok minoritas, namun belum secara spesifik menganalisis bagaimana politik identitas berperan dalam membentuk kebijakan dan praktik kesejahteraan sosial, serta bagaimana kelompok minoritas menavigasi hambatan tersebut dalam konteks lokal seperti Kota Ambon.

Kerangka Konseptual

Berdasarkan tinjauan literatur di atas, penelitian ini mengadopsi kerangka konseptual yang mengintegrasikan teori politik identitas (Castells, 2010), pendekatan kapabilitas dalam kesejahteraan sosial (Sen, 2011), dan teori keadilan distributif (Rawls, 2009). Kerangka ini memungkinkan analisis komprehensif tentang bagaimana politik identitas beroperasi dalam konteks kesejahteraan sosial di Kota Ambon, serta bagaimana hal tersebut mempengaruhi akses kelompok minoritas terhadap layanan kesejahteraan sosial.

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan eksplorasi mendalam tentang fenomena sosial yang kompleks seperti politik identitas dan akses kesejahteraan sosial (Creswell & Poth, 2018). Sementara itu, metode studi kasus memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena tersebut dalam konteks spesifik Kota Ambon, dengan mempertimbangkan nuansa sosial, budaya, dan historis yang relevan (Yin, 2018).

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Ambon, Provinsi Maluku, dengan fokus pada tiga kecamatan yang memiliki karakteristik demografis berbeda: Kecamatan Sirimau (dengan komposisi etnis-agama yang relatif heterogen), Kecamatan Nusaniwe (dengan konsentrasi kelompok minoritas etnis tertentu), dan Kecamatan Teluk Ambon (dengan pola pemukiman yang lebih tersegregasi). Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan variasi dalam komposisi demografis dan pola distribusi layanan kesejahteraan sosial.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa teknik yang saling melengkapi:

1. **Wawancara mendalam:** Dilakukan dengan 32 informan dari kelompok minoritas (berdasarkan etnis, agama, dan status sosial-ekonomi) serta 15 pemangku kebijakan dari institusi pemerintah dan organisasi non-pemerintah yang terlibat dalam penyelenggaraan layanan kesejahteraan sosial.
2. **Observasi partisipatif:** Dilakukan di lokasi-lokasi penyelenggaraan layanan kesejahteraan sosial seperti puskesmas, sekolah, dan kantor layanan sosial untuk mengamati praktik pemberian layanan dan interaksi antara penyedia layanan dan penerima manfaat.
3. **Analisis dokumen:** Meliputi dokumen kebijakan, laporan program, data statistik, dan publikasi media yang relevan dengan politik identitas dan kesejahteraan sosial di Kota Ambon.
4. **Focus Group Discussion (FGD):** Dilakukan sebanyak 6 sesi dengan melibatkan kelompok minoritas, aktivis sosial, akademisi, dan pemangku kebijakan untuk mendiskusikan temuan awal dan memperdalam analisis.

Pemilihan Informan

Pemilihan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling dan snowball sampling. Kriteria inklusi untuk informan dari kelompok minoritas adalah: (1) berasal dari kelompok minoritas berdasarkan etnis, agama, atau status sosial-ekonomi; (2) telah tinggal di Kota Ambon minimal 5 tahun; dan (3) pernah berinteraksi dengan sistem layanan kesejahteraan sosial. Sedangkan untuk pemangku kebijakan, kriteria inklusinya adalah: (1) terlibat dalam perumusan atau implementasi kebijakan kesejahteraan sosial; dan (2) memiliki pengalaman kerja minimal 3 tahun di bidang tersebut.

Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menggunakan pendekatan analisis tematik (Braun & Clarke, 2006). Proses analisis mencakup beberapa tahap:

1. **Transkripsi dan pengkodean:** Semua data wawancara ditranskripsikan dan dikodifikasi untuk mengidentifikasi tema-tema yang relevan dengan pertanyaan penelitian.

2. **Kategorisasi:** Kode-kode yang telah diidentifikasi kemudian dikelompokkan ke dalam kategori-kategori yang lebih luas berdasarkan kesamaan atau keterkaitan.
3. **Identifikasi pola:** Mengidentifikasi pola-pola dan hubungan antar kategori untuk mengembangkan tema-tema utama.
4. **Triangulasi:** Melakukan verifikasi silang antara berbagai sumber data (wawancara, observasi, analisis dokumen) untuk memastikan validitas temuan.
5. **Interpretasi:** Menginterpretasikan temuan dalam konteks kerangka teoretis yang telah dikembangkan dan literatur yang relevan.

Etika Penelitian

Penelitian ini memperoleh persetujuan etik dari Komite Etik Penelitian Universitas Pattimura. Prinsip-prinsip etik yang diterapkan meliputi: (1) informed consent dari semua informan; (2) kerahasiaan data dan anonimitas informan; (3) kesukarelaan partisipasi; dan (4) penghargaan terhadap sensitivitas budaya dan konteks lokal.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Manifestasi Politik Identitas dalam Kebijakan dan Praktik Kesejahteraan Sosial

Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik identitas masih mewarnai kebijakan dan praktik kesejahteraan sosial di Kota Ambon, meskipun telah banyak upaya rekonsiliasi pasca-konflik. Manifestasi politik identitas ini dapat diidentifikasi pada beberapa level:

1. Level Kebijakan

Analisis terhadap dokumen kebijakan menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam alokasi sumber daya dan perencanaan program kesejahteraan sosial antara wilayah yang didominasi oleh kelompok mayoritas dan minoritas. Misalnya, data menunjukkan bahwa proporsi anggaran untuk infrastruktur kesehatan dan pendidikan di wilayah dengan konsentrasi kelompok minoritas relatif lebih rendah dibandingkan wilayah lainnya.

Sebagaimana diungkapkan oleh seorang pejabat di Dinas Sosial Kota Ambon:

"Secara formal, kebijakan kesejahteraan sosial dibuat untuk semua warga tanpa memandang latar belakang. Namun dalam praktiknya, terkadang ada bias tidak tertulis yang memengaruhi prioritas program dan alokasi anggaran." (Informan P3, wawancara, 15 Maret 2023)

Temuan ini sejalan dengan penelitian Mawardi (2019) yang menunjukkan adanya bias sistemik dalam alokasi sumber daya publik yang cenderung menguntungkan kelompok mayoritas.

2. Level Kelembagaan

Pada level kelembagaan, penelitian menemukan adanya representasi yang tidak seimbang dari berbagai kelompok identitas dalam struktur pengambilan keputusan terkait kebijakan kesejahteraan sosial. Dari 15 lembaga pelayanan sosial yang diteliti, hanya 3 lembaga yang memiliki representasi proporsional dari kelompok minoritas dalam struktur manajemennya.

Ketidakseimbangan representasi ini berimplikasi pada sensitivitas lembaga terhadap kebutuhan spesifik kelompok minoritas. Sebagaimana dinyatakan oleh seorang aktivis dari organisasi masyarakat sipil:

"Minimnya representasi kelompok minoritas dalam struktur lembaga pelayanan sosial membuat aspirasi dan kebutuhan spesifik mereka seringkali tidak terakomodasi dalam desain program." (Informan M8, FGD 2, 22 Maret 2023)

3. Level Implementasi

Pada level implementasi, penelitian menemukan bahwa sentimen identitas terkadang memengaruhi proses penyaluran layanan kesejahteraan sosial. Beberapa informan dari kelompok minoritas melaporkan mengalami perlakuan berbeda ketika mengakses layanan publik seperti kesehatan dan pendidikan.

"Ketika saya membawa anak saya ke puskesmas, saya merasa dilayani lebih lambat dibandingkan pasien lain. Saya tidak tahu pasti apakah ini karena latar belakang etnis saya, tapi ini terjadi berulang kali." (Informan M12, wawancara, 28 Maret 2023)

Observasi di beberapa lokasi pelayanan publik juga mengkonfirmasi adanya variasi dalam kualitas pelayanan berdasarkan identitas penerima layanan, meskipun tidak selalu eksplisit dan sistematis.

Hambatan Akses Layanan Kesejahteraan Sosial bagi Kelompok Minoritas

Penelitian mengidentifikasi beberapa hambatan utama yang dihadapi kelompok minoritas dalam mengakses layanan kesejahteraan sosial:

1. Hambatan Geografis dan Infrastruktur

Segregasi spasial yang terbentuk pasca-konflik telah menciptakan pola pemukiman yang terkonsentrasi berdasarkan identitas. Kelompok minoritas cenderung terkonsentrasi di wilayah-wilayah pinggiran yang memiliki infrastruktur yang lebih terbatas. Data menunjukkan bahwa dari

12 kelurahan dengan konsentrasi kelompok minoritas tinggi, 9 di antaranya memiliki jarak lebih dari 5 km ke fasilitas kesehatan terdekat.

"Untuk mencapai puskesmas terdekat, kami harus menempuh perjalanan sekitar 7 km dengan transportasi umum yang terbatas. Ini membuat akses terhadap layanan kesehatan menjadi sangat sulit, terutama dalam situasi darurat." (Informan M5, wawancara, 18 Maret 2023)

2. Hambatan Ekonomi

Kelompok minoritas di Kota Ambon juga menghadapi hambatan ekonomi yang lebih besar dalam mengakses layanan kesejahteraan sosial. Data menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di kalangan kelompok minoritas secara rata-rata 15% lebih tinggi dibandingkan populasi umum. Hal ini berimplikasi pada kemampuan mereka untuk mengakses layanan yang membutuhkan kontribusi finansial, seperti asuransi kesehatan dan biaya pendidikan.

"Meskipun ada program Kartu Indonesia Sehat, banyak dari kami yang belum terdaftar karena berbagai kendala administratif. Akibatnya, ketika sakit, kami harus mengeluarkan biaya yang besar untuk berobat." (Informan M18, FGD 3, 5 April 2023)

3. Hambatan Informasi dan Administratif

Kelompok minoritas juga menghadapi hambatan informasi dan administratif dalam mengakses program kesejahteraan sosial. Keterbatasan akses terhadap informasi tentang program-program yang tersedia, serta persyaratan administratif yang kompleks, seringkali menjadi penghalang.

"Kami sering tidak mendapatkan informasi tentang program bantuan sosial yang baru. Informasi biasanya tersebar melalui jaringan sosial tertentu yang tidak selalu menjangkau komunitas kami." (Informan M22, wawancara, 10 April 2023)

4. Hambatan Kultural dan Psikologis

Hambatan kultural dan psikologis juga mempengaruhi akses kelompok minoritas terhadap layanan kesejahteraan sosial. Trauma pasca-konflik, stigma sosial, dan kurangnya sensitivitas kultural dalam pelayanan publik membuat kelompok minoritas terkadang enggan untuk mengakses layanan tersebut.

"Ada ketidaknyamanan psikologis ketika harus berurusan dengan institusi publik tertentu. Pengalaman diskriminasi di masa lalu membuat banyak dari kami lebih memilih untuk mengandalkan jaringan komunitas sendiri daripada mengakses layanan formal." (Informan M9, FGD 4, 12 April 2023)

Strategi Adaptif Kelompok Minoritas

Menghadapi berbagai hambatan tersebut, kelompok minoritas di Kota Ambon mengembangkan beberapa strategi adaptif:

1. Jaringan Solidaritas Berbasis Komunitas

Kelompok minoritas membangun jaringan solidaritas berbasis komunitas untuk mengatasi keterbatasan akses terhadap layanan formal. Misalnya, beberapa komunitas minoritas di Kecamatan Nusaniwe mengembangkan skema arisan kesehatan yang membantu anggota komunitas dalam situasi darurat medis.

"Kami membentuk kelompok arisan kesehatan yang anggotanya berkontribusi secara rutin. Dana yang terkumpul digunakan untuk membantu anggota yang membutuhkan penanganan medis darurat. Ini menjadi semacam jaring pengaman sosial bagi komunitas kami." (Informan M14, wawancara, 30 Maret 2023)

2. Aliansi Strategis dengan Organisasi Masyarakat Sipil

Kelompok minoritas juga membangun aliansi strategis dengan organisasi masyarakat sipil untuk memperkuat posisi tawar mereka dan mengadvokasi kebijakan yang lebih inklusif. Beberapa organisasi masyarakat sipil di Ambon telah berperan sebagai mediator antara kelompok minoritas dan pemerintah.

"Kami bekerja sama dengan beberapa LSM untuk mengadvokasi hak-hak minoritas dalam akses layanan kesejahteraan sosial. Mereka membantu kami menyuarakan aspirasi kepada pemerintah dan memberi pendampingan teknis." (Informan M25, FGD 5, 18 April 2023)

3. Partisipasi dalam Mekanisme Tata Kelola Lokal

Beberapa komunitas minoritas di Kota Ambon mengambil pendekatan lebih proaktif dengan berupaya meningkatkan partisipasi mereka dalam mekanisme tata kelola lokal, seperti musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) dan forum-forum pengambilan keputusan tingkat kelurahan.

"Kami mulai secara sadar meningkatkan keterlibatan dalam forum-forum seperti Musrenbang. Meskipun tidak selalu mudah, ini menjadi cara bagi kami untuk memastikan suara minoritas didengar dalam proses perencanaan pembangunan lokal." (Informan M30, wawancara, 22 April 2023)

4. Mobilisasi Identitas sebagai Sumber Daya Politik

Menariknya, beberapa kelompok minoritas di Ambon juga menggunakan identitas mereka sebagai sumber daya politik dalam negosiasi dengan pemerintah. Dengan mengklaim status sebagai kelompok rentan dalam konteks pasca-konflik, mereka berhasil mendapatkan perhatian khusus dalam beberapa program kesejahteraan sosial.

"Kami sadar bahwa status kami sebagai minoritas bisa menjadi sumber daya politik. Dalam beberapa kesempatan, kami secara eksplisit mengingatkan pemerintah tentang pentingnya memperhatikan kelompok minoritas sebagai bagian dari proses rekonsiliasi jangka panjang." (Informan M7, FGD 6, 25 April 2023)

Implikasi bagi Kebijakan Kesejahteraan Sosial Inklusif

Temuan penelitian ini memiliki beberapa implikasi penting bagi pengembangan kebijakan kesejahteraan sosial yang inklusif di Kota Ambon:

1. Desain Kebijakan Berbasis Keadilan Substansial

Kebijakan kesejahteraan sosial perlu didesain ulang dengan perspektif keadilan substansial yang mempertimbangkan kebutuhan spesifik dan hambatan struktural yang dihadapi kelompok minoritas. Pendekatan "one-size-fits-all" dalam kebijakan kesejahteraan sosial terbukti kurang efektif dalam konteks masyarakat yang heterogen seperti Kota Ambon.

2. Penguatan Representasi Minoritas dalam Struktur Kelembagaan

Perlu ada upaya sistematis untuk meningkatkan representasi kelompok minoritas dalam struktur kelembagaan yang terkait dengan kebijakan dan layanan kesejahteraan sosial. Ini dapat dilakukan melalui mekanisme kuota atau kebijakan afirmatif lainnya yang memastikan suara minoritas didengar dalam proses pengambilan keputusan.

3. Pengembangan Layanan Berbasis Sensitivitas Kultural

Layanan kesejahteraan sosial perlu dikembangkan dengan mempertimbangkan sensitivitas kultural dan konteks lokal. Ini mencakup pelatihan penyedia layanan tentang kompetensi kultural,

pengembangan materi informasi dalam bahasa lokal, dan adaptasi prosedur layanan sesuai dengan kebutuhan spesifik kelompok minoritas.

4. Pembentukan Mekanisme Pengaduan dan Monitoring Partisipatif

Untuk memastikan akuntabilitas dalam penyediaan layanan kesejahteraan sosial, perlu dibentuk mekanisme pengaduan yang aksesibel bagi kelompok minoritas serta sistem monitoring partisipatif yang melibatkan semua kelompok masyarakat. Ini akan memungkinkan identifikasi dini terhadap praktik diskriminatif dan memfasilitasi perbaikan yang berkelanjutan.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Penelitian ini mengkaji interseksi antara politik identitas dan akses layanan kesejahteraan sosial pada kelompok minoritas di Kota Ambon. Berdasarkan temuan dan analisis yang telah dilakukan, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, politik identitas masih memainkan peran signifikan dalam membentuk kebijakan dan praktik kesejahteraan sosial di Kota Ambon pasca-konflik. Manifestasi politik identitas ini terlihat pada level kebijakan melalui ketidakseimbangan alokasi sumber daya, pada level kelembagaan melalui ketimpangan representasi, dan pada level implementasi melalui variasi kualitas pelayanan berdasarkan identitas penerima layanan. Temuan ini menegaskan bahwa meskipun telah ada upaya rekonsiliasi, namun dimensi identitas masih menjadi faktor penting yang memengaruhi distribusi kesejahteraan sosial.

Kedua, kelompok minoritas di Kota Ambon menghadapi berbagai hambatan dalam mengakses layanan kesejahteraan sosial, yang meliputi hambatan geografis dan infrastruktur (terkait segregasi spasial), hambatan ekonomi (terkait tingkat kemiskinan yang lebih tinggi), hambatan informasi dan administratif, serta hambatan kultural dan psikologis. Hambatan-hambatan ini saling berhubungan dan membentuk pola eksklusi yang kompleks bagi kelompok minoritas.

Ketiga, menghadapi berbagai hambatan tersebut, kelompok minoritas di Kota Ambon mengembangkan strategi adaptif yang menunjukkan resiliensi dan agensi mereka. Strategi adaptif ini meliputi pembentukan jaringan solidaritas berbasis komunitas, membangun aliansi strategis dengan organisasi masyarakat sipil, meningkatkan partisipasi dalam mekanisme tata kelola lokal, serta mobilisasi identitas sebagai sumber daya politik. Strategi-strategi ini menunjukkan bahwa

kelompok minoritas tidak semata-mata menjadi korban pasif dari struktur yang tidak adil, tetapi juga mampu menavigasi dan bernegosiasi dengan struktur tersebut.

Keempat, kebijakan kesejahteraan sosial yang inklusif di Kota Ambon perlu dikembangkan dengan mempertimbangkan kompleksitas politik identitas dan hambatan struktural yang dihadapi kelompok minoritas. Kebijakan berbasis keadilan substansial, penguatan representasi minoritas dalam struktur kelembagaan, pengembangan layanan berbasis sensitivitas kultural, serta pembentukan mekanisme pengaduan dan monitoring partisipatif merupakan beberapa elemen penting dalam kebijakan kesejahteraan sosial yang inklusif.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun telah ada kemajuan dalam rekonsiliasi pasca-konflik di Kota Ambon, namun politik identitas masih memengaruhi akses terhadap kesejahteraan sosial. Transformasi menuju masyarakat yang lebih inklusif dan berkeadilan membutuhkan tidak hanya reformasi kebijakan formal, tetapi juga transformasi dalam relasi sosial dan praktik sehari-hari yang mewujudkan prinsip-prinsip keadilan dan penghargaan terhadap keberagaman.

Rekomendasi

Berdasarkan temuan penelitian, berikut beberapa rekomendasi untuk pengembangan kebijakan dan praktik kesejahteraan sosial yang lebih inklusif di Kota Ambon:

1. Rekomendasi untuk Pemerintah Daerah

a. **Reformulasi kebijakan alokasi anggaran:** Pemerintah Kota Ambon perlu mengembangkan kriteria alokasi anggaran yang lebih sensitif terhadap kebutuhan kelompok minoritas, misalnya dengan mengadopsi pendekatan penganggaran berbasis keadilan (equity-based budgeting) yang mempertimbangkan indeks kerentanan sosial.

b. **Penguatan koordinasi lintas sektor:** Perlu dikembangkan mekanisme koordinasi lintas sektor yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan (pemerintah, masyarakat sipil, kelompok minoritas) untuk memastikan pendekatan yang komprehensif dalam mengatasi hambatan akses kesejahteraan sosial.

c. **Pengembangan database terintegrasi:** Pemerintah perlu mengembangkan database terintegrasi tentang kelompok rentan, termasuk kelompok minoritas, untuk memastikan ketepatan sasaran program kesejahteraan sosial dan menghindari eksklusi.

d. **Peningkatan representasi minoritas:** Pemerintah perlu mengembangkan kebijakan afirmatif untuk meningkatkan representasi kelompok minoritas dalam struktur birokrasi dan pengambilan keputusan terkait kesejahteraan sosial.

2. Rekomendasi untuk Penyedia Layanan

a. **Pelatihan kompetensi kultural:** Penyedia layanan kesejahteraan sosial, seperti tenaga kesehatan dan pekerja sosial, perlu mendapatkan pelatihan tentang kompetensi kultural untuk meningkatkan sensitivitas mereka terhadap kebutuhan spesifik kelompok minoritas.

b. **Pengembangan layanan proaktif:** Penyedia layanan perlu mengembangkan pendekatan proaktif, seperti layanan jemput bola, untuk menjangkau kelompok minoritas yang menghadapi hambatan akses.

c. **Peningkatan transparansi dan akuntabilitas:** Penyedia layanan perlu meningkatkan transparansi dalam prosedur pelayanan dan mengembangkan mekanisme akuntabilitas yang memungkinkan pengawasan oleh masyarakat.

3. Rekomendasi untuk Organisasi Masyarakat Sipil

a. **Penguatan advokasi berbasis bukti:** Organisasi masyarakat sipil perlu memperkuat advokasi kebijakan berbasis bukti dengan melakukan riset partisipatif yang melibatkan kelompok minoritas.

b. **Pengembangan program pendampingan:** Perlu dikembangkan program pendampingan yang membantu kelompok minoritas dalam mengakses layanan kesejahteraan sosial, termasuk bantuan navigasi sistem dan literasi hak.

c. **Fasilitasi dialog lintas identitas:** Organisasi masyarakat sipil dapat berperan dalam memfasilitasi dialog lintas identitas untuk memperkuat kohesi sosial dan mengurangi stereotip negatif antar kelompok.

4. Rekomendasi untuk Kelompok Minoritas

a. **Penguatan kapasitas organisasi:** Kelompok minoritas perlu memperkuat kapasitas organisasi mereka untuk melakukan advokasi efektif dan membangun jaringan dukungan yang lebih luas.

b. **Partisipasi aktif dalam proses kebijakan:** Kelompok minoritas perlu secara aktif berpartisipasi dalam proses kebijakan, seperti Musrenbang dan forum-forum publik lainnya, untuk memastikan aspirasi mereka terakomodasi.

c. **Dokumentasi pengalaman dan pembelajaran:** Perlu ada upaya sistematis untuk mendokumentasikan pengalaman dan pembelajaran dari strategi adaptif yang telah dikembangkan kelompok minoritas sebagai basis untuk advokasi kebijakan.

5. Rekomendasi untuk Penelitian Lanjutan

a. **Penelitian komparatif:** Perlu dilakukan penelitian komparatif antara Kota Ambon dan daerah pasca-konflik lainnya untuk mengidentifikasi pola umum dan kekhususan lokal dalam interseksi politik identitas dan akses kesejahteraan sosial.

b. **Penelitian longitudinal:** Perlu dilakukan penelitian longitudinal untuk memahami dinamika perubahan dalam akses kesejahteraan sosial bagi kelompok minoritas seiring dengan transformasi sosial-politik di Kota Ambon.

c. **Penelitian kolaboratif:** Perlu dikembangkan model penelitian kolaboratif yang melibatkan peneliti, pembuat kebijakan, dan kelompok minoritas untuk memastikan relevansi hasil penelitian bagi pengembangan kebijakan dan praktik.

Rekomendasi-rekomendasi di atas diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan kebijakan dan praktik kesejahteraan sosial yang lebih inklusif dan berkeadilan di Kota Ambon, serta daerah-daerah lain dengan karakteristik serupa. Transformasi menuju masyarakat yang lebih inklusif membutuhkan komitmen dan kerja sama dari berbagai pemangku kepentingan, serta pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, J. (2013). Post-conflict Ambon: Forced migration and the ethno-territorial effects of customary tenure. *Development and Change*, 44(4), 817-837. <https://doi.org/10.1111/dech.12039>
- Aspinall, E. (2011). Democratization and ethnic politics in Indonesia: Nine theses. *Journal of East Asian Studies*, 11(2), 289-319. <https://doi.org/10.1017/S1598240800007190>
- Braithwaite, J., Braithwaite, V., Cookson, M., & Dunn, L. (2010). *Anomie and violence: Non-truth and reconciliation in Indonesian peacebuilding*. ANU Press. <https://doi.org/10.22459/AV.03.2010>
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77-101. <https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa>

- Castells, M. (2010). *The power of identity* (2nd ed.). Wiley-Blackwell.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Hadiz, V. R. (2016). Islamic populism in Indonesia and the Middle East. *Cambridge University Press*. <https://doi.org/10.1017/CBO9781316402559>
- Mawardi, S. (2019). *Kemiskinan dan distribusi layanan publik di Indonesia Timur*. SMERU Research Institute.
- Midgley, J. (2014). *Social development: Theory and practice*. SAGE Publications.
- Nussbaum, M. C. (2011). *Creating capabilities: The human development approach*. Harvard University Press.
- Pariela, T. D. (2018). Reconstruction social patterns in post-conflict Ambon: Policy and practice. *Social Identities*, 24(3), 341-359. <https://doi.org/10.1080/13504630.2017.1387038>
- Rahayu, S. K. (2017). Tantangan akses layanan dasar bagi kelompok rentan di wilayah pasca-konflik. *Jurnal Kesejahteraan Sosial*, 4(2), 112-135.
- Rawls, J. (2009). *A theory of justice* (Rev. ed.). Harvard University Press.
- Sen, A. (2011). *The idea of justice*. Harvard University Press.
- Sumarto, S. (2017). *Addressing poverty and vulnerability in Indonesia through social protection programs*. SMERU Research Institute.
- Tambunan, T. (2018). Inclusive healthcare policy in Indonesia: Barriers and challenges for ethnic minority groups. *Journal of Public Health Policy*, 29(3), 245-262.
- Young, I. M. (2011). *Justice and the politics of difference*. Princeton University Press.
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). SAGE Publications.